



Koran	Hal
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	47
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

OPD DIMINTA URUS KE PUSAT

Rp7 Miliar untuk Bangun Monumen Bela Negara

PADANG-SINGGALANG

Pembangunan monumen bela negara di Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, kembali dilanjutkan. Tahun ini pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp7 miliar, dari Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Agar dana tersebut dapat dimaksimalkan, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menekankan agar organisasi perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti anggaran tersebut. Karena, saat ini pembangunan sudah diserahkan pada Pemprov Sumbar.

"Semula pembangunan monumen bela negara dilakukan Limapuluh Kota, sekarang diserahkan kepa-

da pemprov. Pembangunan monumen PDRI ini menjadi tanggungjawab 6 kementerian. Setelah dikomunikasikan baru Dirjen Kebudayaan Kemendikbud yang bakal alokasikan anggaran Rp7 miliar," sebut Wagub Nasrul Abit usai rapat kelanjutan pembangunan monumen bela negara PDRI di ruang rapat Wagub, Kamis (15/3).

Dikatakannya, dalam rapat tersebut telah disepakati akan dibagi tugas dalam memastikan anggaran dari Dirjen Kebudayaan tersebut. Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini Bidang Cipta Karya diminta untuk segera mencari dokumen-dokumen terkait usulan kewenangan ke Provinsi Sumbar terkait pembangunan monumen bela negara.

"Dinas kebudayaan, Kesbangpol, bersama pihak Kemenhan disini dapat ke kementerian kebudayaan

untuk memastikan dana itu segera turun ke provinsi. Kemenhan dapat mengkoordinir lima kementerian lain untuk segera membantu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, seperti apa yang telah disepakati dari rapat yang dilakukan tim fasilitasi dengan tim pusat pada 19 September lalu," terangnya.

Diharapkannya pembangunan monumen bela negara dapat segera dilanjutkan. Untuk itu, adanya Keputusan Presiden (Kepres) terkait percepatan pembangunan monumen bela negara yang terdapat di Koto Tinggi, Limapuluh Kota, sangat membantu masing-masing kementerian bertanggungjawab dengan kesepakatannya dalam membantu pembangunan yang dilakukan.

"Harapan kita untuk percepatan itu dilakukan tentunya Kepres pemba-

ngunan monumen bela negara ini dapat keluar. Supaya semua kementerian yang telah disepakati akan membantu segera kucurkan anggaran segera," ujarnya.

Terkait pembangunan jalan sepanjang 6 kilometer dari kantor Camat Genuang Omeh menuju lokasi monumen bela negara di Koto Tinggi, dalam pertemuan tersebut disepakati Pemkab Limapuluh Kota akan siap menganggarkannya. Hal itu disebabkan jalan ini berstatus jalan kabupaten.

"Untuk jalan ke lokasi tidak ada persoalannya. Pemkab Limapuluh Kota akan menganggarkan di tahun ini. Sekarang telah bulan Maret, maka perlu menyegerakan untuk jemput bola langsung ke Kementerian terkait agar segera membantu pembangunan monumen bela negara ini segera selesai,

dan dapat dimanfaatkan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesbangpol Sumbar, Nazwir menyebutkan pembangunan monumen bela negara merupakan tanggungjawab 6 kementerian, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pariwisata. Pemprov Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota.

"Koordinasi perlu ditingkatkan. OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumbar diharapkan dapat memastikan kementerian masing-masing untuk segera mengucurkan anggaran yang telah disepakati dalam membantu supaya pembangunan monumen bela negara ini segera selesai," pungkasnya.

